

Nomor : B/116/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat
di
Mataram

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh nilai **70,59** atau predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	23,67	24,69
b. Pengukuran Kinerja	25	16,99	17,67
c. Pelaporan Kinerja	15	11,48	11,67
d. Evaluasi Internal	10	6,48	6,62
e. Capaian Kinerja	20	9,76	9,94
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,53	70,59
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan perubahan yang signifikan dalam penerapan penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang disampaikan pada laporan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, sehingga terjadi kenaikan kategori. Kedepannya diharapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara terus menerus melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pada hasil evaluasi tahun lalu.

Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi AKIP di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Perumusan sasaran strategis pada Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*), dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup, serta belum terlihat keterpaduan perencanaan kinerja antara pemerintah daerah dan PD;
2. Penjabaran kinerja dari tingkat provinsi sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang, namun penjabaran kinerja tersebut belum seluruhnya berdasarkan keterkaitan hasil proses antar level jabatan, sehingga belum dapat menggambarkan hubungan kausalitas kinerja antar level organisasi;
3. Pemetaan *crosscutting* lintas PD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah telah dilakukan baik *crosscutting* dalam mencapai kinerja atau *cross cutting* program, namun belum menyeluruh dan menyentuh aspek implementasi yang efektif dan efisien;
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki aplikasi e-sakip sebagai *database* dan media untuk melihat, menambah, atau reviu dokumen perencanaan kinerja seluruh PD. Dalam hal pemantauan progres dan capaian realisasi program secara bulanan masing- masing program PD menggunakan aplikasi e-kinerja. Akan tetapi aplikasi tersebut belum sepenuhnya bisa berjalan optimal untuk melihat progres secara *updated* dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja PD dan ASN;
5. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level PD dan sebagian besar sudah mengungkapkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, analisis capaian kinerja tersebut belum diungkapkan secara mendalam sehingga laporan kinerja tersebut belum bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum sepenuhnya dapat diandalkan;
6. Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penanggungjawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program terutama untuk program antar PD;

7. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD;
8. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan upaya dalam mendorong penguatan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada. Namun, pembinaan yang dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum optimal, terlihat dari perkembangan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mendorong seluruh pimpinan PD untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja yang ada di dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) telah berorientasi kepada hasil (*outcome*) serta menjawab isu strategis. Selain itu, harus dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup, serta memastikan keterpaduan perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah dan PD (*integrated development plan*);
2. Menyempurnakan penyusunan penjabaran kinerja (*cascading*) berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang. Serta dapat diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggaran agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi;
3. Menyempurnakan *crosscutting* yang telah disusun serta melakukan koordinasi antar PD dalam mengawal prioritas pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas dan kolaborasi antar PD;
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat agar memastikan keselarasan perencanaan dengan penganggaran agar setiap anggaran yang dikeluarkan adalah untuk menunjang kinerja atau kondisi akhir yang diinginkan;
5. Mengoptimalkan aplikasi e-sakip dan e-kinerja dalam pemantauan capaian kinerja agar bisa melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja dari PD. Diharapkan dengan adanya tambahan fitur monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja akan menambah efektivitas dari pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja (*performance based planning*);
6. Memperbaiki penyajian pelaporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran serta tingkat akurasi data sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (*feedback*) bagi perbaikan pencapaian kinerja untuk kedepan;

